

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI MAHASISWA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ANDALAS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

**Prof, Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.,
Dr. Edita Elda, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 8/PK-IV/I/2025

ABSTRAK

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Amanat dari peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administrasi dan juga perlindungan korban. Universitas Andalas pada bulan September 2022 mendirikan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dari awal berdirinya Satgas PPKS Universitas Andalas sampai saat sekarang ini terdapat 21 (dua puluh satu) kasus kekerasan seksual, 20 (duapuluh) kasus hanya sampai di tingkat Satgas PPKS dan 1 (satu) kasus telah sampai ke tahap pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan terkait 1) Bagaimanakah pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas, 2) Apa saja kendala dalam pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas, dan 3) Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis sosiologis (empiris) dan mencari data langsung ke lapangan, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang sudah terkumpul, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Satgas PPKS Universitas Andalas adalah perlindungan hukum preventif yaitu sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk perlindungan hukum represif di antaranya adalah kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan ancaman fisik dan nonfisik, jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi pelapor, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi pendidik. Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum Satgas PPKS Universitas Andalas memiliki kendala diantaranya, kurangnya fasilitas perlindungan, korban yang takut berhadapan dengan aparat penegak hukum, dan kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, LSM, dan LPSK. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan oleh PPKS Universitas Andalas adalah melengkapi fasilitas terkait perlindungan, pendekatan kepada korban, dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, LSM, dan LPSK.

Kata kunci: Satgas PPKS, Permendikbudristek, Perlindungan Perguruan

Tinggi, Kekerasan seksual